

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PEMBINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Islam Riau

**DEVIKA DEVI
NPM : 147310280**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul “Fungsi Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepada Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
6. Kepada keluarga tercinta Bapak saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada kakak dan abang saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Usulan Penelitian ini.
7. Kepada Dela Maiyoza Putri dan suami, Abang Adit, sahabat-sahabat saya Nimas chandra ariza, Thesa pratika, dan teman teman saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada seluruh pegawai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang telah mengijinkan penulis meneliti dan mengumpulkan data di kantor Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dalam naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 15 Desember 2021
Penulis
Ttd

Devika Devi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKR	
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Pemerintahan	16
2. Konsep Implementasi.....	22
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	28
4. Konsep Organisasi Pemerintahan	31
5. Konsep Bimbingan Dan Penyuluhan	32
6. Konsep Ketentraman Dan Ketertiban	38
7. Konsep Pedagang Kaki Lima	41
B. Penelitian Terdahulu	52
C. Kerangka Pikir	53
D. Konsep Operasional	54
E. Operasional Variabel.....	57
F. Teknik Pengukuran	58
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	61

C. Populasi dan Sampel	61
D. Teknik Penarikan Sampel	62
E. Jenis dan Sumber Data.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	66
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	67
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	68
B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru.....	71
C. Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	72
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	85
B. Hasil Penelitian	87
C. Hambatan- Hambatan.....	100
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	102
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	52
II.2 : Operasional Variabel tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	57
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	62
III.2 : Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	66



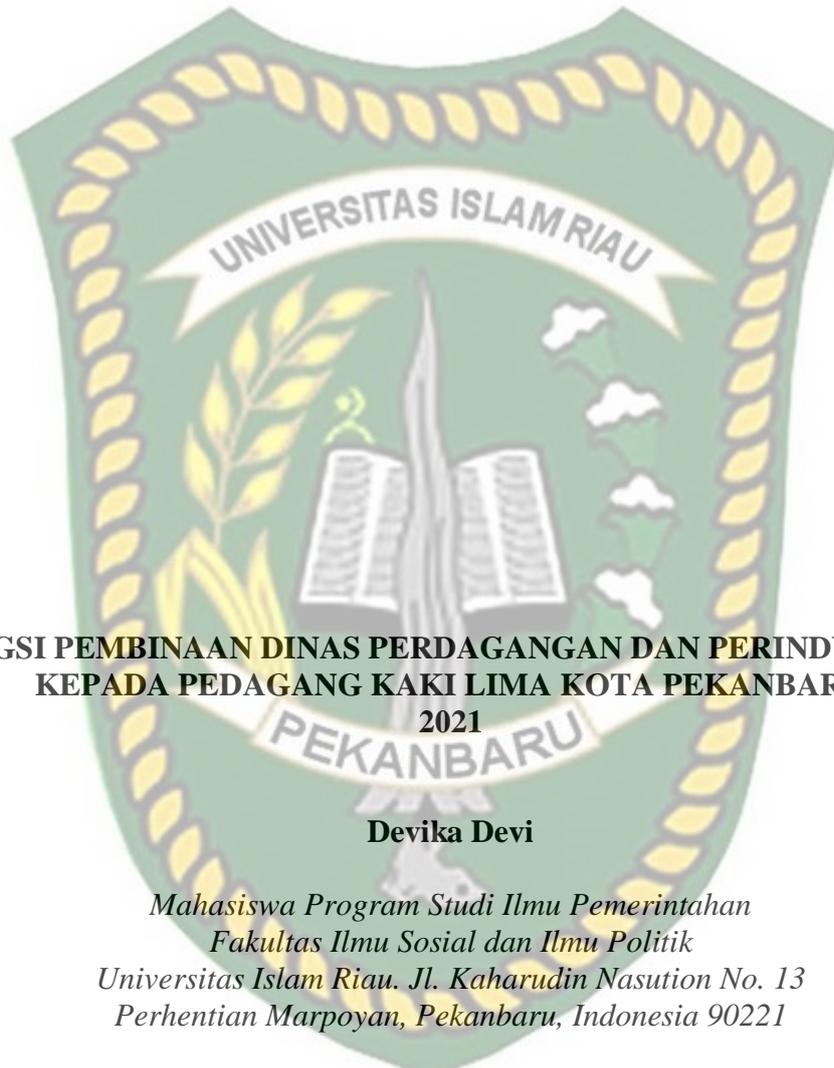
DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	: Kerangka Fikir Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.	54



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**FUNGSI PEMBINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PEKANBARU
2021**

Devika Devi

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau. Jl. Kaharudin Nasution No. 13
Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Fungsi Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Di Pasar Agus Salim. Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru cukup terlaksana dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi dilapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang berjualan. Inilah yang kemudian menghambat kinerja lalu lintas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The title of this research is the Development Function of the Department of Trade and Industry to Street Vendors (PKL) in the Agus Salim Market, Pekanbaru City. This study aims to find out how the implementation of the guidance for street vendors (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City is based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office and to know and understand what The only inhibiting factors for the Implementation of Street Vendor Development (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City are Based on the

Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office. Sociological legal research, namely the author directly goes down to the field to make observations and interviews to find the necessary data. The nature of this research is descriptive, that is, it intends to provide an overview of the main research problems. The location of this research is the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and Agus Salim Market. Implementation of the Guidance of Street Vendors (PKL) in the Agus Salim Market of Pekanbaru City Based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures The Department of Trade and Industry of Pekanbaru City is quite well implemented. However, there are still many things that must be addressed, such as the maximum has not been achieved regarding the Implementation of Guidance for Street Vendors (PKL) at the Agus Salim Market, Pekanbaru City Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Trade Office And Pekanbaru City Industry. The inhibiting factors that occur in the field at this time are the high increase in the number of street vendors (PKL) and the difficulty in placing traders to sell. This is what hinders the traffic performance of Pekanbaru City. Based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office.

Keywords: Implementation, Coaching, and Street Vendors

**FUNGSI PEMBINAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PEKANBARU
2021**

Devika Devi

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau. Jl. Kaharudin Nasution No. 13
Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 90221*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Fungsi Pembinaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Di Pasar Agus Salim. Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru cukup terlaksana dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti belum tercapai secara maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi dilapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang berjualan. Inilah yang kemudian menghambat kinerja lalu lintas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The title of this research is the Development Function of the Department of Trade and Industry to Street Vendors (PKL) in the Agus Salim Market, Pekanbaru City. This study aims to find out how the implementation of the guidance for street vendors (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City is based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office and to know and understand what The only inhibiting factors for the Implementation of Street Vendor Development (PKL) at the Agus Salim Market in Pekanbaru City are Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office. Sociological legal research, namely the author directly goes down to the field to make observations and interviews to find the necessary data. The nature of this research is descriptive, that is, it intends to provide an overview of the main research problems. The location of this research is the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and Agus Salim Market. Implementation of the Guidance of Street Vendors (PKL) in the Agus Salim Market of Pekanbaru City Based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures The Department of Trade and Industry of Pekanbaru City is quite well implemented. However, there are still many things that must be addressed, such as the maximum has not been achieved regarding the Implementation of Guidance for Street Vendors (PKL) at the Agus Salim Market, Pekanbaru City Based on the Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Trade Office And Pekanbaru City Industry. The inhibiting factors that occur in the field at this time are the high increase in the number of street vendors (PKL) and the difficulty in placing traders to sell. This is what hinders the traffic performance of Pekanbaru City. Based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 114 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Trade and Industry Office.

Keywords: Implementation, Coaching, and Street Vendors



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak, tujuan Negara adalah terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan dari rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan.

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg

(dalam Syafiie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat serta dibagilah Indonesia itu sebagai Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua dalam Pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah Daerah, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu.
3. Pemerintah Daerah, daerah Kabupaten dan Kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Agar tujuan Negara dapat tercapai secara optimal maka sangat diperlukannya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di masing-masing daerah.

Pemerintah pusat adalah Pemerintahan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sedangkan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014).

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai objek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih di posisikan sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan – keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan – kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek yang berbuat secara mandiri. Berbuat mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang di harapkan.

Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi

ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi antara daerah maupun pusat.

Jadi Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan absolut yang artinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian

istilah lainnya adalah **urusan pemerintahan konkuren**. Definisinya adalah **Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah**. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Pada pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.

- b. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertahanan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal, dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, ada beberapa urusan pilihan yang diserahkan kepada daerah untuk di kelola dan dikembangkan dapat disebutkan beberapa urusan pilihan. Yang tertera pada Pasal 7 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pertanian/perkebunan.
- c. Kehutanan.
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Pariwisata.
- f. Industri.
- g. Perdagangan, dan
- h. Ketrasmigrasian.

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan tentunya terdapat dalam beberapa bagian untuk mengatur berjalannya tujuan dari suatu pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya mengatur dalam bidang perdagangan. Di dalam suatu kegiatan dalam meningkatkan perekonomian terdapat perdagangan internasional dan perdagangan lokal. Agar perdagangan yang ada di dalam Negara khususnya di daerah-daerah dapat bersaing dengan perdagangan asing atau impor maka sangat dibutuhkan Perlindungan dan pembinaan bagi pedagangnya.

Pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dengan meningkatkan perdagangan di daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang di sebut selanjutnya dengan Disperindag. Disperindag adalah dinas yang bertanggung jawab dengan kualitas perdagangan, keamanan bagi pedagang, serta yang memberikan izin setiap usaha yang di didirikan oleh masyarakat.

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian Timur Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pada umumnya masyarakat di Kota Pekanbaru memiliki mata pencaharian berdagang. Dengan berdagang masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru. Selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan meningkatnya jumlah pedagang sehingga tidak dapat di kontrol lagi pedagang yang berjualan di kaki lima di depan toko-toko atau berjualan di tempat badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas bagi pejalan kaki atau

pengguna motor. Selain penataan pada pedagang kaki lima yang kurang teratur, juga masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha untuk melakukan dagang. Hal ini tentunya dapat mengurangi pendapatan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Disperindag Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan yang penyuluhan kepada pedagang kaki lima khususnya agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Adapun Tugas dan Fungsi Disperindag Kota Pekanbaru adalah :

- a. Fungsi Disperindag Kota Pekanbaru yaitu:
 1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industry dan perdagangan atas d asar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah.
 2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan pengembangan daerah/wilayah yang bersangkutan serta perizinan.
 3. Pelaksanaan kegiatan program sector industry dan perdagangan dibidang program, sub dinas perlindungan konsumen.
 4. Konsultasi dengan Pemerintah di Pekanbaru melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi atau dinas terkait serta organisasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.
 5. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.
 6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor.

7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
 8. Urusan tata usaha kantor Disperindag.
- b. Tugas Sub Dinas Perindustrian
1. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan dan pengembangan, pengelolaan saran industri, serta peningkatan hasil mutu produksi.
 2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan usaha perindustrian.
 3. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan iklim usaha industri.
 4. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan perizinan dan petunjuk legalitas industri, pengawasan dan pengadilan.
- c. Tugas Sub Dinas Perdagangan
1. Mempunyai tugas melaksanakan usaha perdagangan, monitoring, bahan strategis, serta evaluasi dan pelaporan.
 2. Merumuskan dan melakukan pembinaan penerbitan dan daftar perusahaan serta evaluasi dan pelaporan.
 3. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan standar mutu, bimbingan, ukuran, arusanjang, serta evaluasi laporan.

Dari Tupoksi Disperindag di atas bahwa Dinas tersebut bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan khususnya terhadap pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru khususnya di pasar agus salim. Hal ini juga di cantumkan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yaitu pada :

Pasal 1 :

- 1) Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang

Pasal 2 :

- 1) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah
- 2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan factor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3 :

- 1) Setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.
- 2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian, dan keindahan tempat usaha serta kemananan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Pasal 4 :

- 1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasala ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang lebih dipenuhi.
- 3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini di atur oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.
- 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
 - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak dibebaskan ganti rugi.

Pasal 7:

- 1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- 2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Dari peraturan daerah serta Tupoksi dari Disperindag Kota Pekanbaru, seharusnya pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru teratur dan sudah memiliki izin secara keseluruhannya, tetapi hal ini tidak sesuai di lapangan, berdasarkan hasil observasi penulis masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah diberikan izin, terkhususkan pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan mobil dan memarkirkan di badan jalan penjalan kaki.

Bentuk bimbingan dan penyuluhan yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha pedagang kaki lima, mencakup:
 - a. Bimbingan teknis berdagang melibatkan bagian Pemberdayaan pedagang kaki lima dibantu Dinas Perdagangan
 - b. Bimbingan teknis akses perolehan sumber-sumber bahan baku melibatkan akademis perguruan tinggi

- c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber modal dan pemanfaatan permodalan melibatkan dunia perbankan
2. Penyuluhan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha, meliputi:
 - a. Penyuluhan teknis berdagang yang benar melibatkan dinas perdagangan
 - b. Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku yang mudah dan murah
 - c. Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan yang berdaya guna dan berhasil guna melibatkan bank

Berdasarkan data di atas penulis dapat mengambil fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi atau pra survei penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas berjualan dengan menggunakan mobil sebagai media atau tempat berjualan, dan tentunya hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam bentuk gangguan lalu lintas, karna tempat yang digunakan untuk aktivitas berdagang memakan bahu jalan di kawasan perkotaan. Dan lokasi yang kerap di jadikan lokasi untuk menjalankan aktivitas berjualan Jl.Diponegoro.
2. Belum adanya izin perdagangan pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berjualan di badan jalan. Dan perlu adanya

penyuluhan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

3. Belum terlaksananya pemberian Bimbingan dan Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru kepada Pedagang Kaki Lima untuk agar melakukan aktivitas berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya Bimbingan dan Penyuluhan kepada Pedagang Kaki Limas sehingga masih banyak pedagang yang belum memiliki izin usaha dan berjualan di tempat yang tidak memiliki izin atau ilegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitiannya adalah : “Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kewajiban dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru khususnya mengenai tempat untuk melakukan aktifitas berjualan khususnya dengan media mobil sebagai tempat berjualan. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
 2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
 3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, dan adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah

departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musaneff, 1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan

mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraginisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi aka mendukung kepatuhan. Jika sema dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada

karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan

suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majoe dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (dalam Usman. 2002;70)

Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Harsono, 2002:67), mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu pelaksanaan baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Syukur (1987;40).

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b) *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu. Abdullah Syukur, (1987:398)

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan

baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membunyi bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Amdan 2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan tehnik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu factor *Communication*,

Resources, Disposition, dan Bureucratic Struktur (Edward dalam Widodo, 2011;96-110).

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Istilah “manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, baik dilingkungan pemerintahan maupun dilingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan dalam lapangan apapun, cara-cara dalam pencapaian tujuan pada prinsipnya adalah sama, dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen.

Manullang dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:1) mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

“Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Sedangkan menurut Gibson, Donelly, dan Ivancevich dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:2) memberikan pengertian manajemen yang berbeda pula, yaitu:

“Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.”

Menurut Manullang (2002 ; 3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyo (dalam Terry, 2003;7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen.

Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

1. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat di pengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
2. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsur naluri.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5), mengatakan, manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para

praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep manajemen.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama: Perencanaan, Pembuatan keputusan, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengontrolan dan Penyempurnaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

1. *Pembuatan keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
2. *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, pemberian petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah di tetapkan.
3. *Pengkoordinasian* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.

4. *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
5. *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dapat tercapai secara efisien.

4. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2005 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan

persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2005 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

5. Konsep Bimbingan Dan Penyuluhan.

Bimbingan dan Penyuluhan memiliki pengertian yang berbeda dan mengandung makna yang saling berkaian antara satu dengan yang lainnya. Pengertian Bimbingan dan Penyuluhan tersebut akan diuraikan dari masing-masing arti, namun tidak dapat dijelaskan dengan pengertian yang satu. Pengertian bimbingan, berasal dari kata guidance dan konseling yang dahulunya disebut atau dikenal dengan penyuluhan, berasal dari kata counseling. Penggunaan istilah bimbingan dan pnyuluhan sebagai terjemahan dari kata guidance dan counseling ini dicetuskan oleh Tatang Mahmud, MA seorang pejabat Departemen Tenaga kerja Republik Indonesia pada tahun 1953. Sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Tohari Nusnamar:

Menurut riwayatnya, penggunaan istilah penyuluhan sebagai terjemahan *counseling*, sudah dimulai sejak tahun 1953 pencetusnya Tatang Mahmud, MA seorang pejabat di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pada tahun tersebut ia menyebarkan suatu edaran untuk meminta persetujuan kepada beberapa orang yang dipandang ahli, apakah istilah “*guidance and counseling*” dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Bimbingan dan penyuluhan pada waktu itu ternyata tidak ada yang menolaknya.

Penjelasan dari kedua kata bimbingan (*guidance*) dan Penyuluhan (*counseling*), akan diuraikan sebagaimana pada paparan berikut ini :

Secara etimologi bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yakni “*guidance*”. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti: 1. Mengarahkan (*to direct*), 2. Memandu (*to pilot*), 3. Mengelola (*to manage*), 4. Menyetir (*to steer*). Yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu” sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.

Sedangkan pengertian bimbingan menurut terminologi diantaranya “Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial”. (Rachman Natawidjaja, 1989:39)

Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mampu memperkembangkan potensi (bakat, minat, dan kemampuan) yang dimiliki, mengenai dirinya sendiri mengatasi persoalan-persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan kehidupannya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain. (Dewaketut Sukardi, 2000;64)

Dari berbagai pendapat diatas meskipun berbeda-beda dalam menyampaikan pendapatnya tetapi mempunyai persamaan arti dan tujuannya. Bimbingan merupakan pertolongan, namun tidak semua pertolongan merupakan bimbingan. Misalnya: orang yang memberikan pertolongan kepada anak untuk dibangkitkan, hal ini bukanlah merupakan bimbingan, sebab bimbingan masih memerlukan sifat-sifat yang lain, misalnya: seorang guru yang memberikan bantuan jawaban muridnya pada waktu ujian, hal ini juga bukanlah merupakan bimbingan.

Berikut ini langkah-langkah umum dalam melaksanakan suatu bimbingan menurut Nana Syaodih dan Sunaryo Kartadinata (2007: 93)

- a. Mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik
Yaitu tahap yang ditujukan untuk mengidentifikasi macam-macam kebutuhan, tantangan, dan masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh peserta didik serta langkah-langkah identifikasinya. Kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik adalah kebutuhan fisik, sosial, afektif, maupun intelektual. Sedangkan tantangan-tantangan pada peserta didik contohnya adalah Peran sosial, dan pembinaan diri, Manajemen untuk mengelola usaha, pengembangan usaha, dll. Identifikasi kebutuhan dan tantangan dapat dilakukan melalui pengedaran daftar kebutuhan atau tantangan yang disusun dalam daftar checklist.

Sedangkan identifikasi masalah dapat dilakukan melalui pengamatan, catatan anekdot, pengedaran angket, checklist, dan studi dokumenter.

- b. Menganalisis Kebutuhan, Tantangan Masalah Dan Latar Belakang Masalah.

Langkah ini merupakan kegiatan untuk mengungkap intensitas kedalaman dan keleluasaan kebutuhan, tantangan yang dirasakan oleh peserta didik secara individual maupun kelompok. Pengumpulan data selain melihat data yang sudah diperoleh melalui checklist juga perlu dilakukan pengumpulan data yang lebih mendalam. Dilakukan dengan cara wawancara mendalam, pengedaran angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang juga lebih mendalam, pengamatan dan studi dokumenter. Analisis kedalaman masalah atau kesulitan yang dihadapi peserta didik sama dengan analisis kebutuhan dan tantangan.

Analisis kedalaman masalah tersebut yaitu berupa pengungkapan banyaknya butir masalah yang dihadapi peserta didik secara horisontal dan vertikal. Dari berbagai kegiatan pengumpulan data, identifikasi, analisis kedalaman-keleluasaan kebutuhan, tantangan dan masalah serta interpretasi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan-kesimpulan kebutuhan tantangan dan masalahpun dirumuskan dalam bentuk alternatif kebutuhan, masalah bukan hanya dalam satu rumusan kebutuhan masalah. Pembuatan alternatif perkiraan kebutuhan masalah, bukan hanya menggambarkan adanya macam-macam kemungkinan kebutuhan, tantangan dan masalah yang dihadapi peserta didik, tetapi juga tingkat kedalaman dan kekuasaan dari kebutuhan kesulitan tersebut berbeda-beda.

- c. Pemberian Layanan Bimbingan.

Setelah diketahui berbagai kebutuhan dan tantangan serta kesulitan yang dihadapi peserta didik dengan berbagai alternatif faktor-faktor yang melatar belakangi atau penyebabnya, langkah-langkah selanjutnya adalah memilih alternatif layanan bimbingan yang dapat diberikan. Untuk setiap kebutuhan tantangan atau masalah yang dihadapi dapat dirumuskan tidak hanya satu jenis layanan, tetapi dapat

beberapa sesuai dengan jenis dan sifat kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Setelah dibuat alternatif, langkah selanjutnya adalah memberikan layanan bimbingan. Layanan yang diberikan dapat bermacam-macam seperti layanan klasikal, informasi, bimbingan kelompok dan konseling. Untuk mengetahui keberhasilan pemberian layanan bimbingan diadakan evaluasi.

Evaluasi dapat dilakukan selama proses pemberian layanan, pada akhir pemberian layanan dan beberapa waktu berselang setelah pemberian layanan bimbingan. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk pemberian layanan bantuan berikutnya, penyusunan, dan penyempurnaan program bimbingan, penyiapan materi dan media bimbingan, pengisian buku catatan pribadi dan bila perlu untuk bahan penyusunan laporan. Nana Syaodih dan Sunaryo Kartadinata (2007: 93)

Sugarda (1975) dalam Effendi (2005) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan perubahan perilaku dari sasaran sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan. Sasaran dalam pengertian tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan Pedagang pada khususnya. Perhatian terhadap sasaran dalam penyuluhan sangat perlu diperhatikan.

Sebagai seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya, penyuluh memiliki peran yang sangat penting. Menurut Havelock (1973) dalam Effendi (2005) peran utama seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhan antara lain:

- 1) Sebagai motivator, yang mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan.
- 2) Sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.

- 3) Sebagai pemecah masalah, yang membantu masyarakat dalam mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa masalah dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber informasi yang relevan, memilih dan menciptakan pemecahan masalah.
- 4) Sebagai penghubung antar sistem, yaitu mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan persoalan di dalam masyarakat yang dibinanya.

Peran seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhan adalah:

- 1) Sebagai inisiator, yaitu seorang pembawa atau memperkenalkan inovasi untuk perubahan.
- 2) Sebagai simulator, yaitu seorang penghubung inovasi dengan masalah sasaran di dalam suatu sistem sosial masyarakat.
- 3) Sebagai motivator, yaitu seorang pendorong masyarakat suatu sistem sosial untuk melakukan proses perubahan.
- 4) Sebagai katalisator, yaitu seorang yang mempercepat proses perubahan di dalam sistem sosial.
- 5) Sebagai linker, yaitu seorang penghubung antara sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan perubahan (Effendi, 2005).

Perencanaan program penyuluhan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang rasional tentang apa yang akan dilaksanakan, yang ingin dicapai. dan mengapa hal itu harus dilakukan (Slamet dan Suyatna, 1986).

Jahi (1986) mengartikan perencanaan program penyuluhan sebagai proses pembuatan keputusan tentang arah dan intensitas kegiatan penyuluhan, yang didasarkan pada prioritas masalah yang hendak dipecahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada pelaksanaannya kegiatan penyuluhan ada beberapa unsur penyuluhan yang turut serta atau diikuti sertakan dalam unsur pelaksanaan kegiatan menunjang dalam satu kegiatan (Samsudin, 1987). Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur penyuluhan meliputi:

- 1) Petugas Penyuluhan.
- 2) Materi Penyuluhan.
- 3) Metode Penyuluhan.
- 4) Alat Bantu Penyuluhan.
- 5) Sasaran penyuluhan.
- 6) Waktu Dan Tempat Penyuluhan.

6. Konsep Ketentraman Dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “ tentram “ dan “ tertib “ yang pengertiannya menurut W. J. S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang – orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, pikiran. Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib dalam acara aturan sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum, yaitu aturan yang bertalian hukum, ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing – masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“ketentraman adalah keamaan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah –daerah aman dan orang – orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai dengan perturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.”

Definisi diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan – ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa : ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur dan sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma –norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah / daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban dapat terganggu oleh sebab dan keadaan diantaranya :

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku
- b. Bencana – bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.
- c. Faktor bidang ekonomi dan keuangan.

7. Konsep Pedagang Kaki Lima

a. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pedagang Kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa disadari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff, “definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”.

Banyak penjelasan yang ditemui jika membahas pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan pedagang kaki lima maupun mengenai cara pemerintah untuk menata pedagang kaki lima tersebut. Sekilas pedagang kaki lima hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya di pinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan pedagang kaki lima diatas, dalam hal ini jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976) makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai di beri beratap sebagai penghubung rumah dan rumah”.

Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, pedagang kaki lima juga berjualan di emperan toko. Pendapat lain juga mengatakan bahwa istilah kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata “*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan

pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. Pedagang kaki lima juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan pedagang kaki lima tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian pedagang kaki lima dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku lainnya untuk berusaha.

Pedagang kaki lima merupakan bagian sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti Indonesia. Banyak penelitian berpendapat bahwa pedagang kaki lima adalah ciri kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sector informal seperti pedagang kaki lima timbul dari keadaan social ekonomi Negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sector informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak system ekonomi di negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sector informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.

Di berbagai kota besar, keberadaan pedagang kaki lima buormal.kan hanya berfungsi penyangga kelebihan tenaga kerja yang

tidak terserap di sector formal, tetapi juga memiliki peran yang besar yang menggairahkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat jelata, daya serap sector informal yang involutif bukan saja terbukti mampu menjadi sector penyangga yang sangat lentur dan terbuka, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah dan bahkan menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. Pedagang kaki lima juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika pedagang kaki lima tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan yang baru dan unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian pedagang kaki lima dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku lainnya untuk berusaha.

Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sector informal ini berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki

lima menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung kelontong dalam gerobak, menjual makanan dan minuman ditempat keramaian, berjualan mainan anak-anak, berjualan alat-alat kebutuhan pelengkap, bahkan beberapa bentuk permainan dan hiburan yang menghasilkan keuntungan.

Pada umumnya barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan. Produk yang dijual bisa berasal dari olahan sendiri ataupun buatan pabrik / industri besar. Artinya ada keterkaitan antara pedagang kaki lima selaku pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan rokok, makanan, minuman dll. Pedagang kaki lima menjadi ujung tombak penjualan produk-produk pabrikan ini, meskipun mereka para pedagang kaki lima bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut.

Dengan demikian pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitasnya, pedagang kaki lima lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka public yang seharusnya berfungsi sebagai ruang social bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka public sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan pedagang kaki lima ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka public,

meskipun keberadaan pedagang kaki lima ini sebenarnya menjadi salah satu factor pendukung aktivitas di ruang terbuka public.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut:

- 1) Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik public.
- 2) Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesintensi social yang sangat lentur terhadap berbaagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- 3) Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- 4) Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikaatan factor kesamaan daerah asal.

- 5) Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan usaha baru luar sector informal kota.

Menurut Bromley diantara berbagai usaha sector informal usaha pedagang kaki lima, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sector informal kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paliing mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Pengelompokkan pedagang kaki lima (biasanya disekitar bangunan pasar yang permanen) secara sosiologis bisa diperjelaskan sebagai suatu pertukaran ekonomi yang mengandung suatu pertukaran social.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern perkotaan, bentuk-bentuk kegiatan sector informal juga terus berkembang. Dari berbagai macam pekerjaan pada sector nformal, yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima. Kehadirannya dengan jumlah yang cukup besar begitu mendominasi pemunuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama pada golongan menengah kebawah, sehinga studi mengenai serta mengenai sector informa akan lebih lengkap dan menarik bila kita mengkaji pedagang kaki lima. Selain itu pedagang kaki lima diperkotaan merupakan jenis usaha sector informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah didaerah dan jenis usaha informal ini adalah paling monumental. Adapun pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sector

informa dapat dijelaskan melalui ciri-ciri secara umum yang dikemukakan oleh kartono, dkk sebagai berikut:

- 1) Merupakan pedangan yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- 2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bonkar pasang)
- 3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- 4) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jeripayahnya.
- 5) Kualitas barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar.
- 6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- 7) Usaha skala kecil bias berupa family enterprise, dimana ibu dan anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perdagangan kaki lima.

9) Dalam melaksanakan pekerjaan ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.

10) Barang yang dijual biasanya merupakan convenience goods jarang sekali specialty goods.

11) Dan sering kali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh tim penertiban umum (tebum) dan satpol pp sebagai aparat pemerintah daerah.

Secara keseluruhan dari uraian diatas didapatkan simpulan sebagai konseptualisasi sector informal bahwa sector informal pedagang kaki lima perkotaan tidak saja merupakan pelebagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelebagaan social yaitu keadaan integral, baik internal maupun eksternal, dari beragam factor baik social ekonomi politik maupun budaya pada masyarakat modern industrial perkotaan.

Dari sini kita dapatkan posisi yang tegas atas implikasi logis maupun teoritik yang bias saja terjadi dalam ruang dan waktu kontinum yang terus berlangsung, dengan demikian sector informal yang secara terminologis lahir dan berkembang pada hampiran kaidah dan terma ekonomi, selanjutnya mengambil tempat secara langsung dan umum dalam entitasnya sebagai sebuah kenyataan paradigmatik fakta social sekaligus definisi social.

c.. Peran Pedagang Kaki Lima.

Peran sector informal pedang kaki lima dimaksud mendudukan peran pada posisi konseptual yang mampan atau dengan kata lain sebagai sebuah entitas akademik, dimana dalam dimensi dan waktu bekerja atasnya, sedangkan apa dan bagaimana entitas tersebut bergeser atau berubah merupakan kajian perubahan. Krech mengartikan peran sebagai pola kehidupan, tujuan, keyakinan, kepercayaan, perasaan, sikap, nilai dan tingkah laku yang oleh masyarakat diharap menjadi ciri dan sifat individu yang menduduki posisi tertentu.

Sedang menurut Susanto konsep peran mengandung tiga pengertian yaitu:

Peran adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social.

Berdasarkan beberapa pengertian peran tersebut dapat dikatakan bahwa konsep peran pedagang kaki lima adalah suatu keadaan yang dikaitkan dengan status sekaligus pilihan-pilihan yang mungkin diambil pedagang kaki lima perkotaan. Termasuk apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atau dengan kata lain perilaku pedagang kaki lima sebagai individu yang otonom sekaligus bagian dari masyarakat perkotaan modern.

Peran memiliki empat tujuan utama yang diharapkan dapat menarik orang untuk memaikkannya, yaitu: kesempatan untuk mencapai tujuan lain, kesempatan untuk dihargai, untuk memperoleh rasa aman, kesempatan untuk membentuk hubungan social yang merumuskan, dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginnya.

Pedagang kaki lima perkotaan yang berada pada status yang tradisional dan marjinal melalui peran yang dimaikan diharapkan dapat dihargai oleh masyarakat modern perkotaan, memperoleh rasa aman , dan menciptakan hubungan social yang lebih luas sehingan upaya untuk melakukan perubahan peran yang dimungkinkan dlam pekerjaan pedagang kaki lima.

Peran pedagang kaki lima perkotaan paling tidak dapat dipisahkan dalam peran ekonomi dan peran social yang lebih umum. Mengenai peran ekonimi dimaksudkan selain dapat meningkatkan pendapatan para pelaku pedagang kaki lima, juga dapat berperan dalam struktur makro ekonomi seperti distribusi pendapatan perkapita serta pemasukan perekonomian negara. Peran social pedagang kaki lima dapat dilihat dari peran social budaya dan social poltik melalui perubahan prilaku dan gaya hidup yang pingiran atau marjinal yang penuh kepekaan, perasaan, dan ketengahan atau kota yang rasional.

Sedangkan perubahan peran pedagang kaki lima perkotaan terjadi akibat berbagai perlakuan yang dialami, baik dari pemerintah maupun masyarakat perkotaan. Perlakuan dengan atas nama penertiban oleh aparat pemerintah kota dengan citra status social kemerosotan disiplin nasional dan seterusnya memaksa

mereka untuk melakukan respon adaptif. Pedagang kaki lima melakukan respon kreatif dalam menjalankan peran ekonomi dengan melipatgandakan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga untuk menghilangkan citra status social yang buruk.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Terkait Penelitian Yang Berjudul Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Kasrimadi	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013.	2013	Penelitian ini memiliki focus terhadap penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah waktu dan lokasi penelitian.

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2018*

Nama Peneletian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Joni Joko Sarjono	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pontianak Timur.	2014	Persamaan penelitian terletak pada focus penelitian yaitu Pedagang Kaki Lima.	Perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda dan waktu penelitian yang memiliki perbedaan tahun.
Pradipta Bagus Kesuma	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Studi Tentang Pemberian Fasilitas Pemkot Blitar Terhadap PKL)	2015	Persamaan penelitian penulis ada pada focus penelitian dimana focusnya adalah Pedagang Kaki Lima.	Perbedaannya penelitian ini terletak di studi kasus, dimana penelitian terdahulu membahas tentang pemberian fasilitas PKL, dan penelitian penulis adalah pemberian pembinaan.

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2018*

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Upaya Perlindungan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan

dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

2. Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga di temukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep menejemen.
3. Organisasi Pemerintahan Adalah adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.
4. Konsep Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya

dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

6. Penyuluhan pertanian adalah usaha atau kegiatan pendidikan non formal untuk menimbulkan perubahan perilaku dari sasaran sesuai dengan yang dikehendaki atau diinginkan. Sasaran dalam pengertian tersebut adalah masyarakat pada umumnya dan Pedagang pada khususnya. Perhatian terhadap sasaran dalam penyuluhan sangat perlu diperhatikan.
7. Indikator Variabel Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik
 - b. Menganalisis Kebutuhan, Tantangan Masalah Dan Latar Belakang Masalah.
 - c. Pemberian Layanan Bimbingan.
 - d. Petugas Penyuluhan.
 - e. Materi Penyuluhan.
 - f. Metode Penyuluhan.
 - g. Alat Bantu Penyuluhan.
 - h. Sasaran penyuluhan.
 - i. Waktu Dan Tempat Penyuluhan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pelaksanaan kebijakan Publik merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2007:139)	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan.	1. Pelaksanaan Bimbingan	a. Mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik b. Menganalisis Kebutuhan, Tantangan Masalah Dan Latar Belakang Masalah. c. Pemberian Layanan Bimbingan.	Telaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Pelaksanaan Penyuluhan.	a. Petugas Penyuluhan. b. Materi Penyuluhan. c. Metode Penyuluhan. d. Alat Bantu Penyuluhan. e. Sasaran penyuluhan. f. Waktu Dan Tempat Penyuluhan.	

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Skala Likert adalah pengukuran yang digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam penelitian atau suvey. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendapatkan jawaban responden di angka persentase mencapai 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendapatkan jawaban responden di angka persentase mencapai 34%-100%.

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendapatkan jawaban responden di angka persentase mencapai 33%-100%

A. Pelaksanaan Pembinaan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pembinaan berada pada skala 67%-100%.

Kurang Terlaksana: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pembinaan berada pada skala 34%-100%.

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Pembinaan berada pada skala 33%-100%.

B. Pelaksanaan Penyuluhan.

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Penyuluhan berada pada skala 67%-100%.

Kurang Terlaksana: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Penyuluhan berada pada skala 34%-100%.

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pelaksanaan Penyuluhan berada pada skala 33%-100%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya kondisi yang terjadi di daerah penelitian terutama tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. (Sugiyono, 2016:63). Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram. Alasan memilih kuantitatif adalah mempermudah peneliti mengumpulkan data

yang menyangkut pembinaan pedagang kaki lima oleh disperindag kota Pekanbaru.

55

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah tempat Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan Pedagang Kaki Lima yang belum mematuhi peraturan untuk membuat surat izin usaha serta memperhatikan kelangsungan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dalam arti kata tempat jualan para pedagang tidak mengganggu dan mengakibatkan kemacetan dalam berlalu lintas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidaknya. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Bidang Pembinaan dan Perlindungan, Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan, serta Pedagang Kaki Lima. Untuk penjelesalan lebih lengkap mengenai populasi dan sampel yang penulis gunakan pada penelitian ini, maka penulis menyajikannya pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1: Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100 %
2	Bidang Pembinaan dan Perlindungan	1	1	100 %
3	Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan	1	1	100 %
4	Pedagang Kaki Lima	50	50	100 %
Jumlah		53	53	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Pembinaan dan Perlindungan, Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan, digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah Sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Pedagang Kaki Lima sebanyak 30 sampel, untuk penarikan sampel pada kategori ini di gunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kuesioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :
 - a. Identitas responden
 - b. Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Dan untuk sampel responden yang akan menggunakan teknik Angket (Kuisisioner) adalah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Pekanbaru. Cara penulis menyebarkan angket kepada sampel, penulis ke lapangan langsung menemui Pedagang Kaki Lima yang ada di sekitar Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan

menggunakan indra atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dan sampel responden yang akan digunakan dengan teknik Wawancara adalah Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Bidang Pembinaan dan Perlindungan, Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data

tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

NO	Jenis Kegiatan	BULAN DAN MINGGU KE																							
		Juni				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survay																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								

	Ujian
1	Konferensi
0	nsif
	Skripsi
1	Revisi Skripsi
1	
1	Pengandaan
2	Skripsi

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2018*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum pada masa masuknya zaman penjajahan Belanda ke Indonesia nama Pekanbaru dulu dikenal dengan nama “Senapelan” pada saat itu pekanbaru dipimpin oleh kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya seiring berjalan nya waktu lambat laun menjadi perkampungan kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai siak.

Nama payung sekaki tidak dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif membuat pekan disenapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang dirintis tersebut kemudian dilanjutkan putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari selasatanggal 21 rajah 1204 H atau tanggal 23 juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKANBARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU .

2. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur Timur dan 0o25'-0o45' Lintang Utara. Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pekanbaru memiliki lokasi yang strategis untuk kota transit yang menghubungkan antar kota utama dipulau sumatra. Sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

3. Kependudukan

“Pada tahun 2014 Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Suku Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah

sekitar 42,89% dari total penduduk kota, mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai pergaulan yang umum digunakan penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Indonesia.”

Selain itu suku yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959 memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghia Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari selatpanjang, bengkalis dan bagan siapi-api. Masyarakat Tionghoa dari medan dan padang juga banyak ditemui di Pekanbaru terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh pesat sampai sekarang.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota, efektivitas pemerintahan kota dipekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kota Pekanbaru yang dikenal dengan slogan :” kotaku, kotamu dan kota kita bertuah,” mempunyai motto : “bersih, tertib usaha bersama, aman dan harmonis.”

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan , kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan kelurahan wonorejo. Kecamatan tenayan raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan kulim, kelurahan tangkerang timur, kelurahan rejosari dan kelurahan sail. Kecamatan sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan citra raya, kelurahan suka maju dan kelurahan dan kelurahan suka mulia. Kecamatan sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan kampung tengah, kelurahan kampung melayu, kelurahan kendungsari, kelurahan harjosari, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan lima puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan rintis, kelurahan sekip, kelurahan tanjung rhu dan kelurahan pesisir.

B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Bidang Pasar Kota Pekanbaru pada awal mulanya merupakan bagian dari dinas pendapatan daerah yang dikenal sebagai dengan tugas mencari dan menemukan sumber-sumber pendapatan yang dapat menambah pendapatan daerah seperti pajak, retribusi dan pungutan resmi lainnya. salah satu nya adalah

pasar yang dinilai sebagai aset informal dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan perekonomian, pemerintah sadar peranan pasar. Maka dari itu dibentuklah dinas-dinas yang mampu mengelola urusan pemerintahan dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Maka bagian-bagian itu dipisah dari dinas pendapatan daerah dan dinas pasar dengan tujuan agar pelaksanaan kerja lebih optimal dibidang pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru.

Kantor bidang pasar kota pekanbaru telah beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Namun pada saat ini pemerintah telah menepatkan lokasi bidang pasar yang terletak pada dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru yang terletak pada jalan teratai, sukajadi kota pekanbaru.

Dinas Perdagangan serta Perindustrian Kota Pekanbaru adalah galat satu instansi yang Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.

C. Fungsi dan Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Kepala Dinas

Walikota dibantu oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan atau menjalankan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas-tugas pembentuk lainnya.

Rincian Tugas Kepala Dinas (Bab IV Pasal 4 perwako) :

- a. Merancang rencana kerja agar terbentuk suatu program dan kegiatan bidang perdagangan.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan diberikan kepada pegawai untuk menjadi tugas pokok.
- c. Menegaskan kebijakan untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada bidang perdagangan
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum serta berupa pelayan teknis dibidang perdagangan.
- e. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Membimbing pegawai di dalam lingkungan dinas perdagangan.
- g. Melaksanakan tugas yang sudah diberikan yang oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Memiliki rencana untuk menyusun dan merumuskan suatu kerja program sekretaris berdasarkan peraturan undang-undang.

Rincian fungsi sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan susunan koordinasi untuk rancangan kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Melaksanakan penyusunan serta perencanaan untuk koordinasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi.

- c. Memberikan peraturan kegiatan tentang administrasi umum kepegawaian serta keuangan untuk perlengkapan menyusun program.
- d. Memeriksa pengaturan tentang melaksanakan pelayanan.
- e. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab IV pasal 6 Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian umum.
- b. Sub bagian keuangan.
- c. Sub bagian program.

Sub bagian dipimpin oleh seseorang sub bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- a. Sub bagian umum (pasal 7) mempunyai tugas yaitu perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari sub bagian umum antara lain :

1. Menjalankan pengelolaan kepegawain dan tata usaha, umum dan perlengkapan rumah tangga dan kearsipan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi sub bagian umum.

3. Pelaksanaan urusan keptrokolan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 4. Mengelola perjalanan dinas operasional rumah tangga dinas.
 5. Mengelola barang milik daerah serta meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan barang milik daerah.
 6. Pengurusan untuk penggunaan serta pemeliharaan barang milik daerah (BMD)
- b. Sub bagian keuangan
- Sub bagian keuangan memiliki tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi sub bagian keuangan adalah :
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 2. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran.
 3. Penyiapan surat perintah membayar.
 4. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 5. Penyiapan dokumen dan bukti kepemilikan barang daerah selain tanah dan atau bangunan.

6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan dengan tugas-tugas dan fungsinya.
- c. Sub bagian penyusunan program
Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya adalah :
 1. Menyusun rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
 2. Pengumpulan data seperti informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
 3. Pelaksanaan fasilitas barang.
 4. Melaksanakan fasilitas dan penyusun tindak lanjut laporan masyarakat.
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang tertib perdagangan dan perindustrian

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.

Bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan untuk mengatur dan pengawasan agar terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan.
- b. Penyiapan untuk memberi bimbingan kepada teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan .
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan
- d. Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana undang-undang metrologi legal melakukan ukur ulang, mengolah data, dan pengawasan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap seksi masing-masing yang dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepada bidang tertib perdagangan dan perindustrian.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan metrologi yaitu :

Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.

Memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetriologian.
2. Pemantauan, monitoring , evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT metrologi dalam hal alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan perdagangan sebagai berikut :

Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.

Memiliki fungsi yaitu :

1. Pengkoordinasian, membina, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
2. Pengkoordinasian, membina dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
3. Pengkoordinasian, membina keterampilan untuk sektor industri dan perdagangan.
4. Pengkoordinasian, membina dan memberibimbing kepada usaha dan penyusunan laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa.

Tugas dan fungsi seksi pengawasan perdagangan dan perindustrian sebagai berikut:

Mempunyai tugas untuk membantu kepala bidang tertib perdagangan dan perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.

Fungsi nya adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.

2. Pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan penyaluranserta stok bahan pokok kebutuhan masyarakat.
3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
4. 'Pengordinasian dengan unit kerja.
5. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.

4. **Bidang Perdagangan**

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan.

Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa.
2. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan.
3. Perencanaan mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.

4. Pengkoordinasian , pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengkoordinasian, pembinaa dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.

6. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pasar

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.

Bidang pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasiaan dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

2. Perumusan seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.

3. Pengkoordinasiaan serta pembinaan, perumusan, pengumpulan dan penganalisaan setiap data pasar yang ada.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pasar ini terdiri :

- a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan.
- b. Seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima.
- c. Seksi retribusi.

Setiap seksi dipimpin oleh seseorang di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pasar.

Tugas dan fungsi pengembangan pasar dan pengawasan sebagai berikut :

Mempunyai tugas yaitu membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan pasar dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan untuk peralatan kerja.
2. Penyusunan program kerja.
3. Pelaksanaan pelayanan umum.
4. Pelaksanaan program pengawasan atas usaha-usaha penerimaan.
5. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang retribusi pengelola pasar.

Tugas dan fungsi seksi kebersihan, ketertiban, pembinaan pedagang kaki lima sebagai berikut :

Mempunyai tugas membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.

3. Perumusan dan pelaksanaan rencana mengatur dan membina petugas ketertiban pasar serta penyelenggaraan perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
4. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang sehubungan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar.
5. Pengawasan kebersihan dan dan memelihara kebersihan pasar.
6. Melaksanakan rencana penggunaan pengaturan serta pelaksanaan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
7. Mengintrogasi permasalahan dan menyediakan bahan petunjuk untuk memecahkan masalah.
8. Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima.
9. Penataan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan kebersihan pedagang kaki lima.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi serta tugas.

Rincian tugas dan fungsi seksi retribusi sebagai berikut :

Memiliki tugas untuk membantu kepala bidang pasar dalam melaksanakan sub urusan retribusi.

Fungsi sebagai berikut :

1. Menyediakan bahan serta alat untuk perlengkapan kerja.
2. Melaksanakan biaya pengeluaran dan menyetor bukti pembayaran retribusi pengelola pasar.

3. Melaksanakan administrasi pengeluaran dan penyetoran bukti pembayaran retribusi metrologi.
4. Menjaga dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.
5. Penyelesaian tunggakan-tunggakan wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian seksi lainnya.
6. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
7. Pembinaan serta pengawasan evaluasi dan laporan.
8. Membuat hasil laporan kerja para pegawai.
9. Pemberikan tugas-tugas yang untuk dikerjakan oleh para pegawai.
10. Pemberikan arahan terhadap pegawai-pegawai tersebut.

6. Bidang Perindustrian

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian.

Bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.
2. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
3. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaraan pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
4. Promosi produk industri.
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi.
7. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia (SDM)

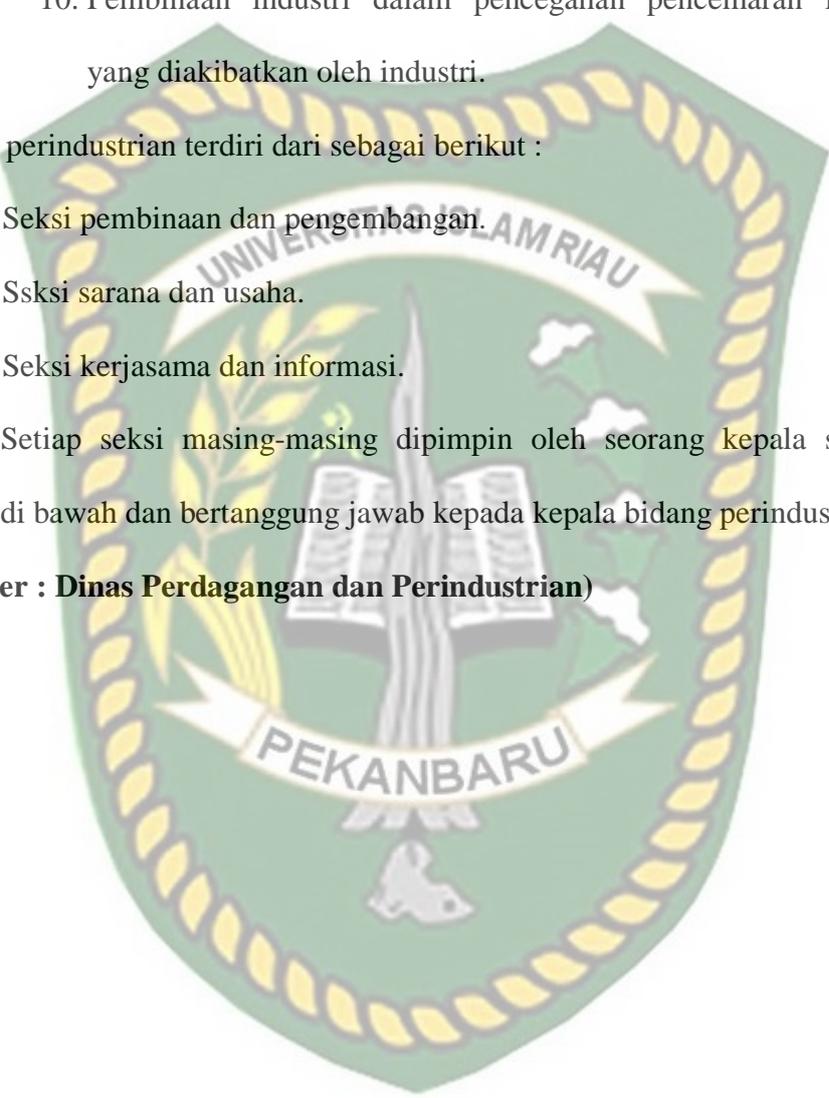
8. Pemberian perlindungan kepastian kepada industri.
9. Penyusunan tata ruang industri.
10. Pembinaan industri dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.

Bidang perindustrian terdiri dari sebagai berikut :

- A. Seksi pembinaan dan pengembangan.
- B. Skski sarana dan usaha.
- C. Seksi kerjasama dan informasi.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian.

(sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang peneliti jadikan sebagai pertanyaan secara jelas dan lengkap. Adapun hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini diantaranya mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam melaksanakan penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan selama informan bersedia untuk memberikan informasi dan jawaban sesuai dengan kebenarannya. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Jenis Kelamin	Informan
1.	Laki-laki	10
2.	Perempuan	3
	Jumlah	13

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan penelitian ini dapat kita bahwa jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki berbeda. Dalam penelitian ini terdapat 13 orang informan yang terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan.

1. Usia Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian tidaklah memberikan batasan usia pada informan dalam penelitiannya. Namun penulis tidak memungkiri bahwa usia merupakan salah satu hal yang membentuk suatu kedewasaan seseorang dalam pola pikirnya. Adapun usia informan berdasarkan dari penelitiannya yaitu :

Tabel V.2 : Umur Informan Penelitian

No	Tingkat Umur (Tahun)	Fruekungsi
1.	25-45	10
2.	46-60	3
	Jumlah	13

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat identitas informan berdasarkan usia adalah 10 orang berumur 25-45 tahun, dan 3 orang berumur 46-60 tahun.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan informan merupakan sebuah data yang harus dapat dianalisis hal ini disebabkan setiap jawaban informan akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban dari

masing-masing informan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang diperoleh pada informan salah satunya dari faktor pendidikan, karena pendidikan sangat berpengaruh atas jawaban yang diberikan kepada penelitian ini diantaranya:

Tabel V.3 : Tingkat Pendidikan Informan Penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata Dua (S2)	2
2.	Strata Satu (S1)	1
3.	SMA	10
	Jumlah	13

Sumber : Hasil Penelitian Penulis Tahun 2021

Berdasarkan data diatas bahwa dapat dilihat tingkat pendidikan informan cukup beragam, mulai dari strata dua(S2) 2 orang, strata satu (S1) 1 orang dan SMA 10 orang.

B. Hasil Penelitian Mengenai Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban,kebersihan,keindahan di Pasar Agus Salim. Untuk menjadi pasar yang

tertib,bersih dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh pemerintah daerah pekanbaru.

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai Pengawasan Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru dengan melakukan wawancara kepada setiap narasumber yang telah ditetapkan.

Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pelaksanaan Bimbingan
2. Pelaksanaan Penyuluhan

Berikut ini hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan 3 orang informan sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan.

1. **Pembimbingan**

Pembimbingan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mau dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang lebih ditetapkan semula.

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam melakukan pembimbingan di pasar agus salim? beliau mengatakan bahwa :

“yang dilakukan dalam pembimbingan dipasar agus salim salah satu nya sering diadakan monitoring.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pihak bidang pasar terhadap pedagang sering dilakukan monitoring hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kan kualitas pasar agus salim terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana, penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam melakukan pembimbingan di pasar agus salim? beliau mengatakan bahwa :

“Telah dilakukan nya monitoting dan himbauan melalui surat edaran.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pihak bidang pasar terhadap pedagang sering dilakukan monitoring dan hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkat kan kualitas pasar agus salim terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yani sebagai pedagang, penulis menanyakan “ menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim dalam membimbing pedagang kaki lima? beliau mengatakan bahwa :

Yang selama ini pedagang kaki lima rasakan upaya upaya dari pihak bidang pasar untuk membimbing kita tidak terlalu sering terjadi, kalau terjadi pun berupa seperti sosialisasi agar menjaga keamanan didalam berjualan hanya itu saja yang selama ni kami rasakan sebagai pedagang kaki lima.

Selanjutnya “ menurut ibu sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

“sampai saat ini belum efisien bimbingan yang diberikan terhadap pedagang kaki lima”

Selanjutnya menurut ibu marta sebagai pedagang kaki lima penulis menanyakan “menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar dalam membimbing pedagang kaki lima? Beliau mengatakan :

“yang mereka berikan terhadap kami bisa dibiang sudah efisien, karena mereka telah membimbing kami contohnya melarang kami jangan membuang sampah sisa dagangan kami”

Kemudian menurut ibu santi sebagai pedagang kaki lima penulis menanyakan “menurut ibu bagaimana upaya kepala bidang pasar agus salim dalam membimbing pedagang kaki lima? Beliau mengatakan :

“pembimbingan yang diberikan pihak bidang pasar dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap pedagang kaki lima yang ada dipasar agus

salim, kemudian dilakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah diberikan kepada pedagang.

Selanjutnya “ menurut ibu sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

“sudah cukup efisien bimbingan yang telah diberikan terhadap pedagang.

Kemudian menurut Ibu marta “sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

“sudah cukup efisien bimbingan yang telah mereka berikan terhadap kami para pedagang kaki lima”

Dari berdasarkan hasil wawancara kedua pedagang kaki lima tersebut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu masih ada kelemahan bidang pasar dalam memberikan monitoring terhadap pedagang. Sehingga pembimbingan bidang pasar tidak cukup memadai.

2. Penertiban

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Kemudian menurut Ibu marta “sudah efisienkah bimbingan yang diberikan oleh pihak bidang pasar tersebut? Beliau mengatakan :

“sudah cukup efisien bimbingan yang telah mereka berikan terhadap kami para pedagang kaki lima”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar, penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam membuat peraturan tata tertib untuk pasar agus salim? beliau mengatakan bahwa :

“membuat tata tertib untuk pasar agus salim salah satu nya dengan membentuk tim keamanan pasar. Fungsi tim keamanan pasar ini bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban pasar agar bisa memantau kondisi tempat berjualan pedagang tersebut.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan tata tertib yang dibuat pihak bidang pasar untuk pedagang sangat penting karna keamanan dan ketertiban pasar sangat berpengaruh terhadap antara pedagang dan pembeli dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan “ menurut bapak bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam membuat peraturan tata tertib untuk pasar agus salim?beliau mengatakan bahwa :

“aturan yang diberlakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan peraturan walikota.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban nya memberlakukan perda dan perwako.Hal ini dibuat agar seluruh pedagang yang berjualan dipasar agus salim harus mengikuti peraturan dan tata tertib yang telah diterapkan.Seperti dilarang berjualan ditepi jalan yang mengakibatkan kemacetan untuk pengendara motor. Seperti yang penulis lihat sendiri masih banyak

pedagang yang ngeyel dan contohnya terdapat di jalan Ahmad Yani setiap pagi bisa dilihat macet parah yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan ditepi jalan Ahmad Yani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi sebagai pedagang, penulis menanyakan “menurut Ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar? Beliau mengatakan bahwa :

“pedagang masih ada yang belum mematuhi peraturan dari pihak bidang pasar karena diakibatkan kekurangan biaya untuk menyewa kios yang telah disediakan oleh pihak bidang pasar untuk berjualan”

Selanjutnya “menurut Ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar memberatkan atau meringankan pedagang ?

“memberatkan, karena sebagian masyarakat enggan untuk berbelanja ditempat yang telah ditentukan oleh pihak bidang pasar, maka dari itu pedagang lebih banyak berjualan ditepi jalan agar mendapatkan keuntungan yang lebih”

Selanjutnya menurut Ibu Marta sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut Ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar? Beliau mengatakan :

“pedagang masih ada yang belum mematuhi, contohnya seperti saya yang masih berjualan dibadan yang jalan yang bisa mengakibatkan kemacetan tetapi para pembeli bisa dilihat lebih banyak membeli ditepi jalan seperti ini sehingga membuat para pedagang lebih senang berjualan ditepi jalan.

Selanjutnya “menurut Ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar memberatkan atau meringankan? Beliau mengatakan :

“jujur saya sebenarnya keberatan dikarenakan penghasilan jualan ditepi jalan jauh sangat berbeda dengan pedagang yang berjualan dikios tersebut.

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah pedagang sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar ? beliau mengatakan bahwa :

“pedang sudah mematuhi peraturan tata tertib yang telah dibuat”

Selanjutnya “menurut ibu apakah peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar memberatkan atau meringkan pedagang ? beliau mengatakan :

“tata tertib yang dibuat tidak memberatkan pedagang. Karna sejauh ini pedagang masih bisa mengikuti atauran tata tertib tersebut.

Berdasarkan wawancara kedua pedagang tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pedagang yang ikut mematuhi peraturan tata tertib dari pihacak bidang pasar, karena sebagian pedagang yang berjualan ditepi jalan yang telah dilarang oleh bidang pasar . hal ini dilakukan oleh pedagang agar dagangan nya banyak yang membeli.

3. Pengaturan

Pengaturan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standart. dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan tata tertib yang dibuat pihak bidang pasar untuk pedagang sangat penting karna

keamanan dan ketertiban pasar sangat berpengaruh terhadap antara pedagang dan pembeli dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “apakah pihak bidang pasar memberikan peraturan untuk tetap menjaga kebersihan lokasi pasar tersebut? beliau mengatakan bahwa :

“iya pihak bidang pasar memberikan peraturan untup tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut sembarangan. ”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guna larangan untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut agar tidak banyaknya terlihat sampah beserakan yaang bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang bisa mengganggu pembeli dan masyarakat yang lewat menggunakan kendaraan bermotor. Pihak bidang pasar telah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk sisa dagangan pedagang tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan “apakah pihak bidang pasar memberikan peraturan untuk tetap menjaga kebersihan lokasi pasar tersebut? beliau mengatakan bahwa :

“ada memberikan peraturan tentang kebersihan pasar”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa guna larangan untuk tidak membuang sampah sisa dagangan tersebut agar tidak banyaknya terlihat sampah beserakan yaang bisa menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang bisa mengganggu pembeli dan masyarakat yang lewat menggunakan

kendaraan bermotor. Pihak bidang pasar telah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk sisa dagangan pedagang tersebut.

Menurut ibu sekar “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan”

“menurut saya kamo sebagai pedagang sudah cukup menjaga aturan dan melaksanakan aturan yang telah dibuat dan ditentukan oleh pihak bidang pasar, contohnya membuang sampah hasil dagangan kami ketempat smpah yang telah disediakan oleh pihak bidang pasar tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu santi sebagai pedagang penulis menanyakan “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

“pedagang sebagian sudah cukup menjalankan aturan yang telah ditetapkan seperti tidak membuang sampah sisa dagangan yang pedagang jual”

Selanjutnya “menurut ibu apakah pihak bidang pasar melarang pedagang untuk tidak menggunakan timbangan orange ? Beliau mengatakan bahwa :

“larangan itu sebenatrnya ada tetapi pedagang belum semua pedagang yang mengikuti aturan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan ibu marta sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu bagaimana peraturan yang diibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

“menurut yang saya lihat pedagang sudah banyak yang mengikuti peraturan yang dibuat oleh pihak bidang pasar tersebut”

Selanjutnya pertanyaan “menurut ibu apakah ada larangan dari pihak bidang pasar dalam menggunakan timbangan orange? Beliau mengatakan :

“kalau soal itu saya tidak mengethui nya dikarenakan saya masih baru saja berdagang disini, mungkin untuk para pedagang uang sudah lama menjual disini mungkin ada larangan bagi mereka”.

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan”menurut “ menurut ibu bagaimana peraturan yang dibuat pihak bidang pasar agar tetap menjaga kebersihan lokasi tersebut? Beliau mengatakan :

“ tidak semua pedagang menjjalankan nya masih ada ditemuin pedagang yang membuang sisa dagangan ditempat lokasi pedagang berjualan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih ada ditemuin pedagang yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak bidang pasar, walaupun barang dagang tersebut tidak menimbulkan bau tidak sedap tetapi sangat mengganggu keindahan jalan. Hal ini perlu ditegaskan kembali kepada pihak bidang pasar untuk lebih sering mempunyai waktu turun kelapangan melihat kondisi lingkungan pasar setelah pedagang kaki lima selesai berjualan ditempat yang bukan semestinya mereka berjualan, dan lebih menegaskan kembali masalah timbangan orange yang tidak semestinya pedagang gunakan agar tidak ada kecurangan.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian

hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suhardi sebagai kepala bidang pasar penulis menanyakan “bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

“prihal pemeriksaan pasar pihak bidang pasar selalu mengupayakan agar pasar agus salim selalu tertib yang mana pihak bidang pasar selalu melakukan peninjauan agar kondisi pasar tetap nyaman bagi para pembeli”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bidang pasar sudah semaksimal mungkin dalam memeriksa lokasi pasar agus salim, pihak bidang pasar juga sudah melakukan yang terbaik untuk memikirkan bagaimana caranya menertibkan pedang-pedagang yang ada di pasar agus salim.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan” bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam memantau keamanan pasar agus salim? Beliau mengatakan bahwa :

“pemeriksaan nya ada, terutama ditengah wabah corona ini tentu nya kami melakukan pemeriksaan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menghimbau pedagang maupun pembeli agar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi masih ada sebagian pedagang yang tidak mengikutinya. Hal ini membuat kami lebih tegas lagi untuk mengatur pedang-pedagang tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak bidang pasar sudah cukup memadai, pemeriksaan tentang keamanan dan kebersihan masih belum efisiensi dikarena masih terlihat dari bentuk kondisi pasar dan masih ada juga sebagian pedagang yang tidak patuh terhadap peraturan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ditengah-tengah wabah virus corona ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam sebagai satuan pelaksana penulis menanyakan “bagaimana upaya pihak bidang pasar dalam memantau keamanan pasar agus salim ? beliau mengatakan bahwa :

“membuat tim keamaan serta melibatkah tokoh masysrakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah kepala bidang pasar agus salim memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasar? Beliau mengatakan :

“tidak ada jadwal tertentu pihak bidang pasar dalam memantau kondisi pasar”

Kemudian menurut Ibu Yani sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah kepala bidang pasar agus salim memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasar? Beliau mengatakan :

“sejauh ini pedagang lihat tidak memiliki jadwal tertentu pihak bidang pasar dalam memeriksa atau memantau kelapangan.

Kemudian menurut Ibu Marta sebagai pedagang penulis menanyakan “menurut ibu apakah kepala bidang pasar Agus Salim memiliki jadwal tertentu untuk melakukan pemeriksaan kondisi pasar tersebut? Beliau mengatakan :

“biasanya tidak ada jadwal tertentu, tetapi akhir-akhir pekan ini pihak bidang pasar memantau kondisi pasar setiap hari mulai dari jam 7 hingga jam 8 pagi”

Berdasarkan wawancara dari kedua pedagang tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurang tegasnya pihak bidang pasar dalam menanganin pemeriksaan kondisi pasar.
menanganin pemeriksaan kondisi pasar.

C. Hambatan- hambatan yang mempengaruhi dalam Pengawasan Bidang Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru

Adapun masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil obeservasi mengenai hambatan dari Pemebimbingan yaitu kemampuan untuk diberikan bimbingan terhadap pedagang belum maksimal. Dikarenakan kurang ketegasan pihak bidang pasar.
2. Hasil observasi mengenai hambatan dari Penertiban sudah maksimal seperti adanya peraturan perda yang ditegaskan oleh pihak bidang pasar agar memberikan efek yang jera terhadap pedagang.
3. Hasil observasi mengenai hambatan dari Pengaturan yaitu tidak semua pedagang mengikuti peraturan yang diberikan oleh pihak bidang pasar.

Pihak bidang pasar sudah semaksimal mungkin memberikan pengaturan dan menegaskannya tetapi pedagang kaki lima masih ada yang susah diatur.

4. Hasil obeservasi mengenai hambatan dari Pemeriksaan yang dilakukan pihak bidang pasar di jalan sudah sesuai kemampuan dan standar pihak bidang pasar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang diharapkan agar penulis dapat memberikan masukan terhadap pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima dipasar agus salim kota pekanbaru.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima telah memberikan peraturan-peraturan dan menjalankan tugas dengan baik. Hanya saja peraturan yang telah diberikan tidak dilakukan oleh para pedagang khususnya pedagang kaki lima.
2. Dinas perdagangan dan perindustrian pada bidang pasar telah memberikan sanksi dan menerapkan sanksi tersebut kepada setiap pedagang yang melanggar peraturan yang telah diberikan khususnya pedagang kaki lima tetapi pedagang kaki lima kerap bersikap acuh tak acuh atas hukuman dan sanksi yang diterima.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran mengenai pengawasan bidang pasar dalam penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar tetap fokus dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru.
2. Di harapkan bagi Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk lebih meningkatkan lagi fungsi pembinaannya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari pedagang kaki lima yang berjualan di pasar agus salim kota pekanbaru.



I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, defenisi, konsep dan teori yang menyangkut studi kepustakaan. Dan dilanjutkan dengan Kerangka Fikir, Hipotesis, Konsep Operasional dan Operasionalisasi Variabel serta Teknik Pengukuran Variabel.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan Kegiatan Waktu Kegiatan Penelitian dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan-perumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40
- Al-Rasyid, Harun. Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.
- Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. Pengantar Manajemen. Kebumen: Mediaterra
- Atik, dan ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewa Ketut Sukardi, 2000. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, hal 64
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
- Hadari, Nawawi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta. Gadjah Mada University Pres.
- Inu, Kencana Syafiiie 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Aditama.
- Manullang. 2002. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muhadam Labolo, 2006, Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Musaneff. 1982. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Natawidjaja, Rachman, 1989. Bimbingan Konseling Di Insitusi Pendidikan. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo.
- R.Terry George. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2003. Filsafat Administrasi, Jakarta. Bumi Askara. 2004. Teori Pengembangan Organisasi, Jakarta. Bumi Askara

- Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2000. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2005. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Waab S.A, 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua, Jakarta; Bumi Aksara.
- Wahab, SA., 2001, Analiis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebiiijakan Publik : Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
- Zulkifli, 2009. fungsi-fungsi manajemen. Pekanbaru.
- Dokumen-Dokumen:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Penelitian Terdahulu :**
- Kasrimadi,. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013 : 2013
- Joni Joko Sarjono, Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pontianak Timur : 2014